

**“Benar secara estetis, keliru secara politis”, “keliru secara estetis, benar secara politis”**

Antariksa  
[antariksa@kunci.or.id](mailto:antariksa@kunci.or.id)

\* Thomas Aquinas pernah mengatakan keindahan hanyalah derivasi dari kebenaran. Apa yang benar pastilah indah, tetapi apa yang indah belum tentu benar. Menurut Aquinas, manakala kebenaran yang hakiki berasal dari Tuhan, maka kebenaran yang bersifat ilahiah itu pastilah membawa sifat-sifat keindahan.

\* Tahun empatpuluhan, dalam pamflet “Kami tahu, ke mana seni lukis Indonesia hendak kami bawa”, pelukis Soedjojono menjelaskan filsafatnya tentang keindahan kerakyatan, yang belakangan sering disebut sebagai realisme Soedjojono. Baginya kebenaran lebih utama dari keindahan, karena apa yang indah belum tentu benar, tetapi apa yang benar selalu indah. Soedjojono mengisahkan tentang seorang bocah yang didandani pakaian jenderal, lengkap dengan pet dan pedang serta sepatu lars. Apakah itu indah? Tidak! Keindahan bocah, kata Soedjono, ketika ia justru bertubuh kotor berlumpur dan berlarian bebas dengan telanjang bulat. Mengapa indah? Karena itulah kebenaran seorang bocah. Di sini Soedjojono menggemakan kembali semangat PERSAGI tentang pelukis Indonesia baru yang “...tidak lagi hanya melukis gubuk yang damai, gunung-gunung yang membiru, hal-hal yang romantis atau indah dan manis-manis, tetapi juga akan melukis pabrik gula dan petani yang kurus dan kerempeng, mobil mereka yang kaya-kaya dan celana pemuda miskin; sandal-sandal, pantolan dan jaket orang di jalanan”.

\* Dua contoh di atas adalah pandangan yang sama-sama lebih mengedepankan dimensi etis (moral), ketimbang estetis. Kalau bagi Aquinas, moral dipahami sebagai moral ilahiah, bagi Soedjojono moral dipahami moral politik sosialis. Jadi, yang lebih penting adalah benar secara moral atau politik.

\* Pandangan macam ini kemudian diadopsi oleh LEKRA. Pada metode-metode kerja keseniannya, terutama setelah 1955, tampak bahwa kesenian diperlakukan sebagai tidak terpisah dengan aktivitas politik. Wujudnya yang paling nyata ada dalam prinsip Satu Lima Satu, yaitu “Dengan berlandaskan azas politik sebagai panglima, menjalankan 5 kombinasi, yaitu meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, memadukan tradisi yang baik dan kekinian yang revolusioner, memadukan kreativitet individuil dan kearifan massa, dan

memadukan Realisme Sosialis dan romantik revolusioner, melalui cara kerja turun ke bawah”.

\* Seni rupa kontemporer kini, sebaliknya, sejak 1965 telah mengalami depolitisasi. Dibandingkan dengan apa yang terjadi pada 1940-1960, seni rupa Indonesia kini menjadi jauh lebih apolitis, dalam pengertian ia menjadi sama sekali terpisah dengan aktivitas politik. Dengan lain kata saya mau mengatakan bahwa politik memang masih muncul (misalnya pada Gerakan Seni Rupa Baru atau pada seni rupa akhir '90-an), tetapi hanya sebagai tema, bukan sebagai alat politik. Di sini politik muncul tidak dalam rangka pencarian moralitas tertentu, melainkan politik muncul sebagai bagian dari komoditas seni rupa.

\* Refleksi teoritis: pada hemat saya estetika bisa dikelompokkan dalam dua jenis saja, yaitu *estetika esensialis* dan *estetika konstruktivis*. Secara ringkas, dengan estetika esensialis, saya maksudkan paham estetika yang percaya adanya sesuatu yang bersifat “auratis” yang disebut “indah”, apapun maknanya kata itu. Secara aksiologis, estetika jenis ini bisa disebut objektivis. Artinya, kualitas “indah” dan “tidak indah” letaknya ada pada suatu benda, entah ada yang menilainya atau tidak. Sedangkan dengan estetika konstruktivis, saya maksudkan paham estetika yang percaya bahwa apa yang disebut “indah” sebenarnya hanyalah sebetuk fungsi sosial. Secara aksiologis, estetika jenis ini bisa disebut subjektivis. Artinya, kualitas “indah” dan “tidak indah” letaknya ada pada manusia yang menilai, bukan pada benda yang dinilai.

\* Dari cara pandang esensialis, seni dianggap sebagai punya otonomi mutlak, yang bernilai dalam dirinya sendiri dan hanya bisa dibicarakan dalam dirinya sendiri. Estetika adalah estetika. Dengan demikian, pemahaman dan penilaian atas seni hanya bisa dilakukan menggunakan kriteria-kriteria seni itu sendiri untuk mengukur kualitas keindahan. Kualitas keindahan itu bisa diukur dari kriteria-kriteria yang melulu fisik dan inderawi, hingga kriteria-kriteria yang lebih mistis. Karena itu termasuk di dalam kriteria-kriteria untuk mengukur keindahan itu adalah pengalaman akan keindahan. Di antara jenis-jenis pengalaman keindahan yang sering disebut dalam beberapa karya penulis seni Indonesia terkemuka belakangan ini adalah kenikmatan-kenikmatan tekstual seperti *jouissance* atau *plaisir*.

\* Dari cara pandang konstruktivis, seni sama sekali tak bersifat mistis. Keindahan bukanlah sebuah kualitas mistis dan auratis, melainkan hasil konstruksi sosial. Dan karena dia bersifat konstruktif, maka fenomena seni bisa dijelaskan dengan melihat bagaimana konstruksi itu dibuat dan dijalankan, oleh siapa, dan untuk tujuan apa.

\* Tetapi kita juga mesti hati-hati dengan pandangan konstruktivis ini. Karena dengan mudah bisa membuat kita tergelincir untuk menghubungkan seni dengan kelas atau ideologi dengan formula satu banding satu. Kalau demikian maka yang terjadi adalah reduksionisme sosial atas seni. Karya-karya para konstruktivis seni

mutakhir menunjukkan bahwa bentuk dan isi sebuah lukisan misalnya, tidak bisa direlasikan secara sederhana ke dalam ideologi atau ekspresi kelas. Karena pembagian kelas itu sendiri bersifat kompleks, dan bagaimana lukisan memanifestasikan suatu ideologi kelas selalu dimediasi oleh bahasa representasi visualnya (ideologi visual). Dan ideologi visual ini tidak bisa dideduksi dari ideologi kelas. Dasar dari pandangan ini adalah seni dilihat sebagai sebuah praktik penciptaan makna (*signifying practice*), yang mengakui kekhususan dan otonomi. Tetapi otonomi seni tidaklah bersifat total dan mutlak karena ia merupakan produk sejarah. Otonomi seni selalu bersifat relatif. Praktik-praktik budaya saling mempengaruhi baik pada tingkat produksi, representasi, regulasi, maupun pada saat ia dikonsumsi. Seni mempunyai otonominya sendiri, dalam arti ia mempunyai kode-kode dan konvensi-konvensi representasi artistik yang dimediasi dalam bentuk. Tetapi sekaligus seni merupakan produk dari faktor-faktor politik dan ideologi, yang termanifestasikan dalam kekhususan seni itu sendiri.

## **POLITICALLY CORRECT dalam SENI RUPA KONTEMPORER.**

Istilah "politically correct" cukup sering kita dengar dalam pembahasan seni rupa kontemporer Indonesia, yang dalam satu dekade ke belakang memang cukup sarat dengan konten sosial-politik. Istilah politically correct kerap dipadankan dengan istilah "aesthetically correct." Kedua istilah tersebut berasal dari risalah Walter Benjamin yang menegaskan bahwa sebuah karya hanya mungkin politically correct jika karya tersebut juga aesthetically correct. Sebetulnya Walter Benjamin lebih menyorot karya sastra, sebagaimana diungkapkannya,

"A work which exhibits the right tendency must, of necessity, show every other quality as well....The tendency of a work of literature can be politically correct only if it is also correct in the literary sense."

Pendapat Walter Benjamin tersebutlah yang ditegaskan oleh Janet Wolff bahwa, "...that is impossible for a work to be politically correct unless it is also aesthetically correct." Dalam hal ini jelas bahwa sebuah karya dapat dianggap benar secara politis, jika karya tersebut telah diterima dan dianggap valid oleh medan seni yang menilainya.

Namun harus diingat bahwa pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Walter Benjamin tahun 30-an, tatkala wacana seni rupa jauh berbeda dengan saat ini, selain juga pernyataan tersebut didasari oleh kecenderungan kiri (Marxist). Maka patut diduga bahwa medan seni yang menganugerahkan kualitas estetis tak lepas dari pengaruh kekuatan dan kekuasaan politik. Dalam sejarah seni rupa, hal ini misalnya dapat dilihat dari dominannya kecenderungan Realisme Sosial dalam negara komunis, yang juga mewarnai sejarah seni rupa modern Indonesia, ketika partai komunis masih bercokol menguasai dunia politik Indonesia. Dengan kata lain aesthetically correct merupakan wilayah yang formatnya pun ditentukan melalui tangan-tangan kekuasaan politik.

Istilah "politically correct" sesungguhnya sejak awalnya digunakan secara pejoratif, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Paul Berman, sbb:

"'Politically Correct' was originally a phrase on the Leninist left to denote someone who steadfastly toed the party line. Then it evolved into 'PC' an ironic phrase among wised up leftists to denote someone whose line-toeing fervour was too much to bear."

Istilah "politically correct" kembali populer dalam perdebatan akademik dalam kampus-kampus di Amerika dan secara khusus digunakan—juga secara pejoratif—terhadap kelompok yang mengusung politik identitas, khususnya multikultur, yang memperjuangkan kesetaraan ras, etnis, gender dan homoseksual. Gerakan ini cukup signifikan terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi—juga bocor pada medan seni—dan

telah menimbulkan reaksi anti "PC", khususnya dari kelompok konservatif sayap kanan. Namun yang menarik penentangan terhadap "PC" sebagian juga datang dari kelompok kiri.

Dalam konteks seni rupa kontemporer, Whitney Biennial dipandang sebagai pameran yang sangat kental dengan kecenderungan politically correct. Belum pernah sebelumnya pameran besar di Barat menampilkan demikian banyak seniman wanita, kulit berwarna dan kegiatan seni yang melibatkan publik. Banyak di antara seniman tersebut belum mendapatkan pengakuan dari contemporary art world di sana. Secara umum Whitney Biennial merepresentasikan multikulturalisme. Banyak pihak yang menganggap bahwa karya-karya yang dipamerkan sangat banal, tidak menunjukkan kompleksitas dan tidak memiliki esensi. Singkatnya tidak aesthetically correct. Bienal tersebut dipandang terlalu politis, dan secara kasat mata terlalu menunjukkan representasi politik identitas. Tidak mengherankan bienal tersebut menuai banyak kritik dan menimbulkan kontroversi dan polemik yang cukup berkepanjangan. Satu hal yang menarik, bienal tersebut dijadikan pembenaran secara politis oleh para politisi untuk mengurangi sokongan dana terhadap kegiatan seni rupa kontemporer

Dalam konteks politik, kebudayaan dan seni di Barat setelah tahun 80an, maka istilah politically correct menunjukkan upaya penentangan terhadap budaya dominan, yang dimainkan oleh kelompok menengah, laki-laki, kulit putih dan terpelajar. Namun dalam konteks budaya Indonesia saat ini, khususnya dalam lingkup seni rupa kontemporer agak sulit mendudukan dan menetapkan pengertian politically correct dan aesthetically correct. Lain halnya jika perbincangan politically correct tersebut ditarik pada masa Orde Lama dan Orde Baru, tatkala sosok penguasa politik dan para punggawanya tampil dengan jelas. Dalam masa itu, politically dan aesthetically correct dapat dipandang dalam dua sisi yang dengan mudah diperlawankan, pihak penguasa atau pihak tertindas.

Sebagai contoh, karya-karya abstrak dalam masa Orde Baru, kendati tak memiliki konten politik bias jadi, menurut pihak penguasa merupakan karya yang secara politis benar, justru karena tak memiliki konten politik. Sebagaimana kita ketahui Orde Baru berkehendak agar rakyat menjadi a-politik, tak memiliki kesadaran politik, sehingga mudah dikendalikan. Janet Wolf mengingatkan, bahwa sebuah karya bisa jadi politis tanpa harus memiliki konten masalah politik,

"More relevant for the sociology of art is the fact that art which is neither explicitly nor allegorical concerned with politics is none the less political. For example, a painting with apparently 'innocent' subject-matter can be decoded to identify its political and ideological position."

Namun, bagi Mulyono, karya-karyanyalah yang barangkali berhak menyanggah istilah *politically correct*, tatkala dia menampilkan karya tentang Marsinah. Pelarangan pameran Marsinah tersebut menunjukkan bahwa pihak penguasa memiliki persepsi yang sama dengan Mulyono mengenai potensi politis yang terkandung dalam karya yang akan dipamerkan, karya-karya Mulyono dipandang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketenangan-situasi politik. Hanya saja, pihak penguasa, karena dalam posisi berseberangan bisa jadi justru menganugerahi karya-karya Mulyono tersebut sebagai "*politically not correct*"

Tidak hanya *politically correct* menjadi bermasalah, dalam era reformasi ini, tetapi juga *aesthetically correct* tak lagi mudah ditetapkan batasannya. Tentu saja *aesthetically correct* sangat berkaitan dengan nilai dan kualitas yang ditetapkan terhadap karya seni. Namun dalam era seni rupa kontemporer yang jelas menentang azas tunggal ketetapan estetik, jelas bahwa *aesthetically correct* menjadi wilayah yang sangat relatif. Sebab sangat mungkin, dalam seni rupa kontemporer anti-estetik dan/atau anti keindahan bisa jadi benar secara estetis, dan itu terbukti bisa dijustifikasi oleh para pelaku dan pembelanya.

Bagaimana mengenai pameran seni rupa Klinik Seni Taxu, yang bertajuk Memasak & Sejarah dalam kaitan dengan *politically correct* dan *esthetically correct*? Mari kita bicarakan dalam diskusi ini.